


## Aktor dan Kepentingan dalam Kebijakan Pendidikan

Fahmi<sup>1\*</sup>, Khusnul Khotimah<sup>2</sup>, Diah Puspita<sup>3</sup>, Ghea Audysa Sherly<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, KM.3,5, Kec. Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: [fahmi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:fahmi_uin@radenfatah.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6660>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 30 April 2026

Revised: 12 May 2026

Accepted: 31 May 2026

#### Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan,  
Aktor Kebijakan,  
Kepentingan Kebijakan

#### Keywords:

Education Policy, Policy  
Actors, Policy Interests

### ABSTRACT

Pendidikan adalah sektor penting dalam pembangunan nasional yang memerlukan kebijakan yang tepat agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pendidikan serta berbagai kepentingan yang memengaruhi proses penyusunan dan pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, guru, organisasi masyarakat, dan media. Pihak-pihak ini memiliki peran yang berbeda, baik sebagai pembuat kebijakan, pelaksana, maupun pengawas kebijakan. Selain itu, setiap pihak membawa kepentingan tertentu yang mencakup kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan ideologis. Interaksi antara pihak-pihak dan kepentingan ini menimbulkan dinamika berupa negosiasi dan kompromi dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses kolaboratif yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kerja sama, koordinasi, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

*Education is a crucial sector in national development that requires appropriate policies to effectively improve the quality of human resources. This study aims to analyze the stakeholders involved in education policy and the various interests that influence its formulation and implementation. The method used is a literature study, reviewing various sources such as books, journals, and relevant scientific articles. The results show that education policy is not solely determined by the government but also involves various stakeholders, such as educational institutions, teachers, community organizations, and the media. These stakeholders have distinct roles, including policymakers, implementers, and supervisors. Furthermore, each stakeholder brings specific interests, encompassing political, economic, social, and ideological interests. The interaction between these stakeholders and interests creates dynamics in the form of negotiation and compromise in the policy process. Therefore, education policy is the result of a collaborative process influenced by various interacting interests. The success of education policy depends heavily on the cooperation, coordination, and support of all stakeholders, resulting in effective, inclusive policies that meet the needs of the community.*



*This is an open access article under the CC-BY-SA license.*

**How to Cite:** Fahmi, et al (2026). Aktor dan Kepentingan dalam Kebijakan Pendidikan, 4(4) 26177-26183. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6660>

## PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang berkaitan dengan pengaturan, perencanaan, serta pelaksanaan sistem pendidikan. Kebijakan ini mencakup berbagai hal seperti

kurikulum, manajemen sekolah, tenaga pendidik, pembiayaan pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Dalam proses perumusannya, berbagai aktor memiliki kepentingan masing-masing.

Proses pembuatan kebijakan publik saat ini lebih partisipatif dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah. Ini juga berlaku untuk kebijakan pendidikan, yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga akademik, dan sektor swasta. "Aktor kebijakan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan publik" (Sosial et al., 2023). Keterlibatan berbagai aktor dalam kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dibuat oleh berbagai kepentingan yang bekerja sama. Setiap aktor memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, yang dapat memengaruhi jalan kebijakan.

Selain itu, dinamika kepentingan yang muncul selama proses kebijakan sering menyebabkan perselisihan dan perundingan antara berbagai aktor. Ini disebabkan fakta bahwa kebijakan pendidikan mencakup bidang akademik selain bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sebagai contoh, perdebatan sering terjadi tentang kebijakan kurikulum pendidikan antara pemerintah, akademisi, dan praktisi pendidikan tentang isi kurikulum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendapat yang berbeda tentang masalah ini menunjukkan kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses kebijakan.

Oleh karena itu, memahami siapa saja yang terlibat dalam proses kebijakan pendidikan, serta kepentingan apa saja yang mempengaruhi proses tersebut, sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan dalam sistem pendidikan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan memerlukan kajian teoritis dan beberapa referensi dari literatur ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah tentang topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini mencakup data tentang objek atau variabel, seperti catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dll (Putri Arum, 2019).

Dalam proses penelitian, buku literatur harus ada. Studi pustaka adalah proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur. Ini juga disebut studi literatur-review, atau kajian pustaka. Studi pustaka adalah seperti kunci yang dapat membuka semua pintu yang dapat membantu memecahkan masalah. Artinya, studi pustaka juga dapat digunakan untuk argumentasi, dugaan, atau prediksi. Berbagai jenis literatur, atau sumber pustaka, dapat digunakan. Pada dasarnya, semua literatur dapat digunakan sebagai sumber pustaka; lebih-lebih lagi, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, literatur juga dapat diakses melalui internet (Amruddin, Muskananfolia Isthia, Febriyanti Erna, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengertian Aktor dalam Kebijakan Pendidikan***

Ada banyak orang yang terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Aktor kebijakan adalah orang-orang yang memiliki peran dan pengaruh ini. Aktor kebijakan memiliki peran penting karena mereka bertanggung jawab untuk menentukan jalan dan keberhasilan kebijakan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, aktor kebijakan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai pihak lain, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Aktor kebijakan biasanya dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, kekuasaan, dan sumber daya untuk mempengaruhi proses kebijakan (Medtek, n.d.).

"Aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan publik melalui jaringan kebijakan", kata Ilhami (Sosial et al., 2023). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, tidak hanya dipengaruhi oleh satu pihak saja, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda.

Selain itu, dari sudut pandang kebijakan publik kontemporer, aktor kebijakan tidak lagi terbatas pada pemerintah. Organisasi profesi, lembaga penelitian, masyarakat sipil, dan media massa sekarang juga memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pendidikan. "Dalam proses kebijakan publik modern, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan kebijakan, tetapi

bekerja bersama berbagai aktor lain yang tergabung dalam suatu jaringan kebijakan," kata Ilhami (Sosial et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa proses kebijakan pendidikan bersifat kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak yang saling berinteraksi dalam suatu sistem kebijakan.

Menurut Syahfahlepi dan Sujianto, aktor kebijakan bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi kebijakan melalui dukungan, koordinasi, dan keterlibatan aktif dalam proses kebijakan (Syahfahlepi, M. R., 2025).

Akibatnya, aktor kebijakan tidak hanya berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan pendidikan, tetapi juga memainkan peran penting dalam implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut. Di Indonesia, aktor kebijakan dapat berasal dari berbagai institusi dan lembaga, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi guru, dan masyarakat. Semua pihak ini memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam proses kebijakan pendidikan.

Menurut Ningrum, "Pemerintah merupakan aktor utama dalam kebijakan pendidikan karena memiliki kewenangan dalam membuat regulasi, mengalokasikan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan sistem pendidikan." Namun demikian, peran aktor non-pemerintah juga sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan, terutama melalui advokasi, penelitian, dan keterlibatan mereka dalam diskusi publik tentang kebijakan Pendidikan.

Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktor kebijakan pendidikan adalah individu atau kelompok yang memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Keberadaan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa berbagai pihak, masing-masing dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda, membentuk kebijakan pendidikan.

### ***Jenis Jenis Aktor dalam Kebijakan Pendidikan***

Dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, terdapat berbagai aktor yang memiliki peran dan pengaruh yang berbeda. Aktor-aktor tersebut dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Keberadaan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil interaksi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap sistem pendidikan (Darsyah, 2003).

Menurut Ilhami, ada dua kelompok utama aktor dalam kebijakan publik: aktor formal yang memiliki otoritas resmi dalam proses pembuatan kebijakan, sedangkan aktor informal adalah pihak yang tidak memiliki otoritas langsung dalam proses pembuatan kebijakan tetapi dapat mempengaruhinya melalui berbagai bentuk partisipasi.

#### **1. Aktor Pemerintah**

Karena mereka memiliki otoritas untuk menetapkan regulasi, menyusun program pendidikan, dan menetapkan anggaran untuk pendidikan, pemerintah berperan penting dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk sistem pendidikan Indonesia. Pihak yang terlibat dalam kebijakan pendidikan oleh pemerintah meliputi (Riyanta, 2018):

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- b. Pemerintah daerah
- c. Dinas pendidikan
- d. Lembaga legislatif (DPR dan DPRD)

Menurut Ningrum, pemerintah bertanggung jawab secara strategis untuk menetapkan kebijakan pendidikan melalui pembuatan regulasi, pengalokasian anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan.

#### **2. Lembaga Pendidikan**

Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan aturan untuk sistem pendidikan nasional, yang membuat peran mereka sangat penting. Institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi juga berperan penting dalam kebijakan pendidikan dan memiliki peran dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah (Pendidikan & Kekuasaan, 2025).

#### **3. Guru dan Tenaga Pendidik**

Salah satu aktor penting dalam penerapan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah adalah pendidik. Ini karena guru adalah satu-satunya orang yang secara langsung berinteraksi dengan siswa

dan mengelola pembelajaran di kelas. Pada akhirnya, kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah akan berdampak pada apa yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, kesiapan, pemahaman, dan komitmen guru terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

Guru tidak hanya melaksanakan kebijakan tetapi juga menerjemahkan kebijakan ke dalam aktivitas kelas. Mereka harus memahami tujuan kebijakan dan bagaimana mengimplementasikannya melalui metode pembelajaran, strategi pengajaran, dan pengelolaan kelas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, guru memiliki peran strategis dalam menjembatani antara kebijakan yang bersinggungan dengan kebijakan (Riyanta, 2018).

"Guru merupakan aktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan karena mereka berperan langsung dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pembelajaran di kelas," kata Syahfahlepi dan Sujianto.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik dan guru memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan. Mereka berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

#### 4. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Selain itu, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berkontribusi terhadap kebijakan pendidikan. Mereka dapat memberikan kritik, masukan, dan saran kepada pemerintah tentang berbagai kebijakan (Fakultas et al., 2017).

Selain itu, organisasi masyarakat biasanya berkampanye untuk kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan.

#### 5. Media Massa

Media massa juga dapat memengaruhi kebijakan pendidikan. Mereka memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Melalui pemberitaan di televisi, surat kabar, dan media digital, masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan pendidikan dan memahami tujuan dari kebijakan tersebut.

Media massa juga memiliki potensi untuk memengaruhi opini publik tentang kebijakan pendidikan. Media sering menggunakan agenda setting dan framing, yaitu cara mereka menentukan masalah apa yang penting dan bagaimana masyarakat memahaminya. Oleh karena itu, media sangat memengaruhi sikap masyarakat terhadap kebijakan pendidikan, baik dengan mendukung maupun mengkritiknya (Marcelinus Muklis CN, 2024).

### ***Kepentingan dalam Kebijakan Pendidikan***

Setiap pihak yang berpartisipasi dalam proses kebijakan pendidikan memiliki kepentingan khusus yang memengaruhi sikap dan tindakan mereka selama proses tersebut. Kepentingan ini bisa ideologis, ekonomi, sosial, atau politik. "Setiap aktor dalam jaringan kebijakan membawa kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi arah dan proses pembuatan kebijakan publik," kata Ilhami.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan didasarkan pada pertimbangan akademik dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat (Pendidikan & Kekuasaan, 2025):

#### 1. Kepentingan Politik

Kepentingan politik pemerintah yang berkuasa sering dikaitkan dengan kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah bidang yang strategis karena berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga kebijakan pendidikan sering digunakan untuk mendapatkan dukungan politik. Kebijakan pendidikan biasanya diintegrasikan ke dalam program pembangunan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperkuat legitimasi kekuasaan (Pendidikan & Kekuasaan, 2025).

Pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai program pendidikan sering dianggap sebagai program unggulan. Program-program ini termasuk pendidikan gratis, beasiswa untuk siswa kurang mampu, bantuan operasional sekolah, dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendidikan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Fernando & Sirozi, 2023).

Selain itu, kebijakan pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pemerintah sering memilih kebijakan yang memiliki dampak cepat dan dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga kebijakan pendidikan kadang-kadang berfokus pada kepentingan politik jangka pendek daripada kebutuhan pendidikan jangka Panjang (Septiadi, 2021).

Oleh karena itu, pendidikan dan politik sangat terkait satu sama lain. Pertimbangan akademik dan kebutuhan pendidikan tidak hanya memengaruhi kebijakan pendidikan, tetapi juga perubahan politik negara. Oleh karena itu, agar kebijakan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, para pembuat kebijakan harus tetap mengutamakan pendidikan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Oleh et al., n.d.).

## 2. Kepentingan Ekonomi

Pembangunan ekonomi sebuah negara sangat terkait dengan kebijakannya. Pendidikan sering dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Akibatnya, sektor pendidikan diprioritaskan dalam pembangunan nasional di banyak negara (Handraini & Magriasti, 2023).

Selain itu, kebijakan pendidikan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan industri. Kurikulum sekolah, pelatihan keterampilan, dan pengembangan vokasi sering direncanakan untuk memungkinkan siswa memenuhi kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan daya saing negara dalam menghadapi persaingan global.

## 3. Kepentingan Sosial

Kepentingan sosial masyarakat juga memengaruhi kebijakan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, banyak kebijakan pendidikan berfokus pada pemerataan akses pendidikan, tidak peduli latar belakang ekonomi seseorang (Islam et al., 2024).

Untuk mendorong pemerataan pendidikan, pemerintah biasanya menawarkan program bantuan pendidikan, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan pembangunan sekolah di daerah terpencil. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi perbedaan pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan sosial, diharapkan pendidikan dapat menjadi alat mobilitas sosial yang memungkinkan seseorang meningkatkan kualitas hidupnya dengan belajar.

## 4. Kepentingan Ideologis

Ideologi yang berkaitan dengan prinsip dasar negara juga sering memengaruhi kebijakan pendidikan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan norma, nilai, dan keyakinan yang penting bagi masyarakat dan negara. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter dan kepribadian bangsa sering dikaitkan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Pemerintah berusaha menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki etika, moral, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan negara mereka melalui kebijakan pendidikan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran nasional, prinsip-prinsip seperti nasionalisme, toleransi, persatuan, dan gotong royong sering dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran penting dalam membangun karakter bangsa dan sekaligus menjaga ideologi bangsa hidup dalam masyarakat (Kemerdekaan, 2025).

### ***Hubungan Aktor dan Kepentingan dalam Kebijakan Pendidikan***

Aktor dan kepentingan adalah dua komponen penting dalam proses kebijakan pendidikan. Setiap orang yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan ini memengaruhi sikap, pandangan, dan tindakan mereka selama proses tersebut. Mereka dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, kelompok masyarakat, dan masyarakat umum.

Setiap tahapan perumusan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan menunjukkan hubungan antara aktor dan kepentingan. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan teknis dan akademik

bukan satu-satunya yang memengaruhi proses kebijakan pendidikan; aktor yang memiliki kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh yang lebih besar biasanya memiliki posisi yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan (Handraini & Magriasti, 2023).

Menurut Ilhami (2023), "Proses kebijakan publik merupakan hasil interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda dan saling bernegosiasi dalam suatu jaringan kebijakan (policy network)." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dibuat secara eksklusif oleh pemerintah; sebaliknya, itu adalah hasil dari proses interaksi, komunikasi, dan negosiasi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda (Sosial et al., 2023).

Dalam kenyataannya, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pendidikan dan kepentingan mereka sering menghasilkan dinamika yang cukup kompleks. Semua pihak berusaha mempertahankan kepentingannya agar dapat dimasukkan ke dalam kebijakan. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia, sedangkan guru dan tenaga pendidik ingin memperbaiki kesejahteraan, perlindungan profesi, dan peningkatan proses pembelajaran di sekolah.

Selain itu, masyarakat juga ingin akses terhadap pendidikan murah dan berkualitas. Organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa adalah cara yang paling umum untuk menyampaikan kepentingan masyarakat ini. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan sangat penting karena mereka dapat memberikan masukan dan mengontrol kebijakan pemerintah (Fernando & Sirozi, 2023).

Menurut Syahfahlepi dan Sujianto (2025), "Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan dalam kebijakan tersebut", menunjukkan bahwa tidak hanya perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga kerja sama, koordinasi, dan dukungan dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut (Syahfahlepi, M. R., 2025).

Oleh karena itu, hubungan antara aktor dan kepentingan kebijakan pendidikan adalah komponen penting yang menentukan jalan dan keberhasilan kebijakan pendidikan. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, kebijakan pendidikan dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan diskusi tentang aktor dan kepentingan dalam kebijakan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak yang memiliki peran, pengaruh, dan kepentingan yang berbeda. Individu atau kelompok yang terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan dianggap sebagai aktor dalam kebijakan pendidikan. Adanya aktor ini menunjukkan bahwa pemerintah bukan satu-satunya yang menentukan kebijakan pendidikan; banyak pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap sistem pendidikan juga melakukannya.

Dalam proses kebijakan pendidikan terdapat berbagai jenis aktor, baik aktor formal maupun aktor informal. Aktor formal seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif memiliki kewenangan resmi dalam membuat serta menetapkan kebijakan pendidikan. Sementara itu, aktor informal seperti lembaga pendidikan, guru, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa juga memiliki peran penting dalam memberikan masukan, dukungan, maupun kritik terhadap kebijakan yang dibuat.

Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan pendidikan memiliki kepentingan yang berbeda, yang memengaruhi cara mereka bersikap dan bertindak dalam proses kebijakan. Kepentingan ini dapat berupa sosial, ekonomi, politik, atau ideologis. Kepentingan politik terkait dengan upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat melalui program pendidikan; kepentingan ekonomi terkait dengan peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi; dan kepentingan sosial terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses ke pendidikan. Namun, kepentingan ideologis terkait dengan penerapan nilai-nilai dan sifat bangsa melalui sistem pendidikan.

Adanya interaksi dan dinamika yang kompleks dalam proses kebijakan pendidikan ditunjukkan oleh hubungan antara aktor dan kepentingan kebijakan pendidikan. Semua pihak berusaha mempertahankan kepentingannya agar mereka dapat dimasukkan ke dalam kebijakan yang dibuat. Oleh

karena itu, kerja sama, koordinasi, dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat sangat penting untuk keberhasilan kebijakan pendidikan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berbagai aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda berinteraksi untuk membuat kebijakan pendidikan. Sinergi antara aktor-aktor ini sangat penting agar kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- Amruddin, Muskananfolo Itha, Febriyanti Erna, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Media Sains Indonesia.
- Darsyah, S. (2003). *At-Thullab : Jurnal Of Islamic Studies Kebijakan Dalam Pendidikan*. 3715.
- Fakultas, W., Sosial, I., Universitas, H., Surabaya, N., & Menjadi, A. (2017). *GURU : ANTARA PENDIDIK , PROFESI , DAN AKTOR SOSIAL*. 1(1), 1–10.
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2023). Pengertian “ Politik Pendidikan ” dan Perbedaannya dengan “ Pendi dikan Politik ” dan “ Politisasi Pendidikan .” 6, 10994–11000.
- Handraini, H., & Magriasti, L. (2023). *Kebijakan Sertifikasi Guru dari Perspektif Hubungan Ekonomi Politik dan Pendidikan di Indonesia*. 7, 29462–29469.
- Islam, U., Sulthan, N., Saifuddin, T., Jln, A., Rahman, A., No, H., Sipin, S. I. V, Telanaipura, K., & Jambi, K. (2024). *Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sedikit banyak di pengaruhi oleh latar belakang bertujuan untuk menguras atau mendapatkan sumber daya suatu bangsa yang di kuasai demi 1 . Tujuan Pendidikan Islam beberapa aspeknya , misalnya tentang : 5.*
- Kemerdekaan, S. (2025). *Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Perbandingan Kebijakan Pendidikan Indonesia Sebelum dan . 1(3), 132–144.*  
<https://doi.org/10.62734/jurnalpuspaka.v1i3.453>
- Marcelinus Muklis CN, M. S. (2024). *Peran media massa dalam kebijakan publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 133–140. doi: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4159>
- Medtek, J. (n.d.). *Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.*
- Oleh, D., Konstitusi, M., & Indonesia, R. (n.d.). *Membangun konstitusionalitas Indonesia.*
- Pendidikan, D. A. N., & Kekuasaan, S. (2025). *Proses politik dalam perumusan kebijakan publik*. 6(1), 7–17.
- Putri Arum. (2019). *Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling : Sebuah Studi Pustaka. Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 4(September), 39–42.
- Riyanta, S. (2018). *Jurnal Analis Kebijakan | Vol. 2 No. 2 Tahun 2018*. 2(2).
- Septiadi, M. A. (2021). *Kekuatan politik dalam pembentukansistempendidikannasional*. 2(2), 133–146.
- Sosial, J., Ju, K., & Ilhami, R. (2023). *Policy Network Actors as Units of Public Policy Analysis Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi ( Ju - SoSAK )*. 1, 103–111.
- Syahfahlepi, M. R., & S. (2025). *Peran Aktor Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Guru di Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 24–38.